

Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten)

Ayu Lestari¹, Ria Yuni Lestari², Wika Hardika Legiani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ayulst4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan model interaktif dengan tahapan data collection, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pemeriksaan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji triangulasi data dari berbagai sumber dan berbagai teknik kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu berperan dalam merealisasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana dalam peraturan tersebut ada permakanaan, sandang, asrama/cottage yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan pemulangan ke daerah asal. Kegiatan yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu kegiatan keterampilan berupa pelatihan montir motor, kegiatan bimbingan mental spiritual, kegiatan bimbingan fisik, dan kegiatan bimbingan sosial. Faktor penghambat PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu keterlambatan pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke PSRTS Provinsi Banten dikarenakan covid-19. Faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya kerjasama dengan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kata Kunci: PSRTS Provinsi Banten, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis.

Abstract

This study aims to describe the role of the social institution for social rehabilitation of Banten Province in the development of homeless and beggars. This research was conducted at the Social Institutions for Social Rehabilitation (PSRTS) Banten Province. This study used a descriptive method with a qualitative approach. This study used three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. While the analysis technique used an interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation and verification. Data checking in this study was carried out by triangulating data from various sources and various techniques and then drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the social institution for social rehabilitation of Banten Province in the development of homeless and beggars is to play a role in realizing the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia number 16 of 2019 concerning the National Standard for Social Rehabilitation where in these regulations there are easily accessible food, clothing, dormitories/cottages, supplies. health, physical, mental, spiritual and social guidance, guidance on basic skills, facilities for making identification numbers, birth certificates, marriage certificates and/or children's identity cards, access to basic health services, and return to their place of origin. Activities carried out by PSRTS Banten Province in guidance for homeless and beggars are skills activities in the form of motorbike mechanic training, mental-spiritual guidance activities, physical guidance activities, and social guidance activities. The inhibiting factor for the Banten Province PSRTS in fostering homeless and beggars is the delay of the district / city

Peran Pantu Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Pantu Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari¹, Ria Yuni Lestari², Wika Hardika Legiani³

social service in sending students to the PSRTS Banten Province due to covid-19. Supporting factors for PSRTS Banten Province in the Development of Homeless and Beggars in the form of cooperation with the Health Office, Social Service, Regional Human Resources Development Agency (BPSDMD) and the Indonesian National Army (TNI).

Keywords: *PSRTS Banten Province, Development, Homeless and Beggars.*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat pelik yang membayang-bayangi kehidupan masyarakat dunia, dimana permasalahan ini seperti tidak berkesudahan yang terus menerus menjebak mereka untuk tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurut Arfiani (2009:2) berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya di alami oleh Negara yang masih menyandang status sebagai Negara berkembang tetapi Negara yang telah menyandang status sebagai Negara majupun masih mengalami masalah kemiskinan. Dimana Negara maju seperti Inggris dan Amerika serikatpun masih mengalami masalah kemiskinan. Kategori miskin sendiri menurut Dinas Sosial Provinsi Banten (2018: II2) yaitu yang tidak memiliki sumber mata pencaharian; dan/atau memiliki sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami tiap Negara begitu pula dengan Indonesia yang masih mengalami masalah kemiskinan. Padahal dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 masyarakat miskin merupakan tanggung jawab dari Negara, adapun bunyi dari Undang-undang tersebut ialah “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa masyarakat miskin merupakan tanggung jawab dari Negara, dan Negara berkewajiban untuk mengusahakan agar setiap warga Negeranya mendapatkan penghidupan yang layak dengan melakukan pemberdayaan, menyediakan berbagai

fasilitas baik fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum yang layak. Akan tetapi sepertinya apa yang tertera dalam Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) tersebut belum bisa terelasisasi dengan sempurna, menurut Firadika (2017:70) Pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 belum terlaksana dengan efektif, penyebabnya ialah kurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga masyarakat Indonesia masih mengalami masalah kemiskinan yang cukup buruk, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia yang menyandang status miskin di perkotaan sebesar 9994.8 dan di wilayah perdesaan sebanyak 15149.92 bila dijumlah antara penyandang status miskin di perkotaan dan perdesaan ialah berjumlah 25144.72 dan di Banten jumlah penduduk yang miskin ada 654.46 (data diperoleh dari allstats BPS).

Kemiskinan memang masalah yang cukup pelik yang dialami Negara Indonesia tetapi selain masalah kemiskinan, masyarakat Indonesia juga diperparah keadaannya dengan permasalahan pengangguran yang seakan mendukung keberadaan kemiskinan itu sendiri, menurut Fatma (2005:54) menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi dari BPS ialah mencapai 7,05 juta orang di bulan Agustus tahun 2019. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. (dilansir dari <https://ekbis.sindonews.com/> oleh Rina Anggraeni di post pada tanggal 05 November tahun 2019). Dan provinsi yang memiliki pengangguran tertinggi di

Indonesia adalah Provinsi Banten, dimana menurut data dari BPS pengangguran yang ada di Banten pada bulan Agustus tahun 2019 mencapai angka pengangguran sebesar 8,11%. (dilansir dari <https://m.detik.com/finance/> oleh Bahtiar Rifa'i di post pada tanggal 05 November tahun 2019).

Bila mengacu pada data dari BPS mengenai jumlah penyandang kemiskinan dan juga berita yang membahas tentang angka pengangguran yang tentu saja jumlah angka tersebut bukanlah angka yang kecil atau sedikit. Masih banyak warga Indonesia yang mengalami kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa membantu mereka keluar dari masalah kemiskinan. Meskipun begitu mereka tentu saja tidak berdiam diri membiarkan kemiskinan mengakhiri hidup mereka.

Masyarakat yang mengalami kemiskinan melakukan berbagai upaya agar mereka setidaknya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Sadewo, dkk. (2015:27) berpendapat bahwa mereka yang mengalami kemiskinan tidak hanya diam saja atau tidak melakukan upaya apapun, mereka memiliki cara sendiri untuk mengatasi kemiskinanannya. Meskipun cara itu kerap kali tidak bisa diterima, contoh dari tidak bisa diterimanya upaya mereka adalah kebijakan tata ruang kota yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Gelandangan dan pengemis merupakan contoh nyata dari pihak yang tidak diuntungkan dengan kebijakan tata ruang kota tersebut. Menurut Tempo.co gelandangan dan pengemis kerap kali dianggap merusak keindahan kota (dilansir dari [https:// metro.tempo.co](https://metro.tempo.co) di post oleh tempo.co pada tanggal 22 Juni 2015). Selain dianggap merusak

keindahan kota keberadaan gelandangan dan pengemis juga dianggap mengganggu ketertiban umum (dilansir dari

<https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/> di post oleh Ririn Nur Febriani pada tanggal 25 september 2018). Penyebab dari keberadaan gelandangan dan pengemis sendiri menurut mantan Menteri Sosial Bapak Agus Gumiwang ialah kemiskinan. (dilansir dari <https://dinsos.bantenprov.go.id/> di post oleh admin dinsos pada tanggal 08 September tahun 2019). Pengertian gelandangan dan pengemis sendiri menurut Dinas Sosial Provinsi Banten (2018: II7-8) menjelaskan bahwa gelandangan ialah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Adapun kategori dari gelandangan ialah mereka yang tidak memiliki kartu tanpa penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti, tanpa penghasilan yang tetap, dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Sedangkan pengemis sendiri memiliki artian orang-orang yang mendapatkan penghasilan di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan meminta-minta untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kategori pengemis ialah mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh dan compang camping, berada di tempat-tempat ramai atau strategis, dan memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Menurut Kuntari dan Hikmawati (2017: 23-24) akar dari permasalahan gelandangan dan pengemis

ialah kepemilikan lahan yang sempit, pendidikan rendah, dan ketiadaan keterampilan serta kondisi geografis yang tak menguntungkan menyebabkan kemiskinan hingga mereka hidup dalam strata lapisan paling bawah. Enggan untuk terus hidup dalam kemiskinan mereka mencari penghidupan yang lebih baik, akan tetapi dikarenakan semangat juang yang rendah dan mudah menyerah menyebabkan mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

Menggelandang dan mengemis merupakan upaya mereka untuk bertahan hidup, akan tetapi tentu saja cara mereka tidak bisa dibenarkan. Karena cara mereka hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif oleh pemerintah untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Mantan Menteri Sosial yaitu Bapak Agus Gumiwang mendesak pemerintah daerah (pemda) ataupun pemerintah provinsi (pemrov) untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis karena menurutnya permasalahan dasar dari keberadaan gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan. Populasi gelandangan dan pengemis pada tahun 2019 mencapai angka 584.923. Angka tersebut masih butuh dipertanyakan kevalidannya, dikarenakan pendataan untuk gelandangan dan pengemis relatif sulit. (dilansir dari <https://dinsos.bantenprov.go.id/> di post oleh admin dinsos pada 08 September tahun 2019). Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2020 menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Banten ialah 462 orang untuk gelandangan dan 706 orang untuk pengemis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Banten. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Data gelandangan dan pengemis tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Gelandangan			Pengemis		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kabupaten Pandeglang	34	16	50	36	10	46
2.	Kabupaten Lebak	1	1	2	2	3	5
3.	Kabupaten Tangerang	125	42	167	122	139	261
4.	Kabupaten Serang	68	34	102	123	34	157
5.	Kota Tangerang	38	27	65	27	27	54
6.	Kota Cilegon			6	23	15	38
7.	Kota Serang	11	15	26	59	44	103
8.	Kota Tangerang Selatan	31	13	44	30	12	42
Provinsi Banten		308	148	462	422	284	706

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten

Mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis, pemerintah mendirikan Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten. Fungsi dari PSRTS Provinsi Banten ini yaitu untuk melakukan pemulihan dan pengembangan sosial. Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menurut ketua seksi pemulihan dan pengembangan Bapak Iwan, PSRTS Provinsi Banten memang menerima gelandangan dan pengemis yang dikirim dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Banten untuk di bina di PSRTS Provinsi Banten agar gelandangan dan pengemis tersebut setelah selesai dibina oleh PSRTS Provinsi Banten tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Bapak Iwan menambahkan tidak ada perbedaan kuantitas dari gelandangan dan pengemis ketika baru masuk sampai selesai di bina di PSRTS Provinsi Banten. Menurut data dari PSRTS Provinsi Banten jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina dari tahun 2016-2019 di PSRTS Provinsi Banten ialah:

Tabel. 2 jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina di PSRTS Provinsi Banten

No	Tahun	Gepeng	Gelandangan	Pengemis
1.	2016	40		
2.	2017		30	30
3.	2018		15	15
4.	2019		30	20

Sumber: PSRTS Provinsi Banten

Sehubungan dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini masuk kedalam penelitian rumpun sosial masyarakat (sosmas) dan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran PSRTS Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis agar pasca pembinaan mereka tidak kembali lagi ke jalanan untuk menggelandang dan mengemis, juga kegiatan apa saja yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, serta faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi PSRTS Provinsi Banten selama melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. Penelitian ini penting untuk dilakukan di PSRTS Provinsi Banten dikarenakan masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Banten dan PSRTS Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pemulihan dan pengembangan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2018:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandas filsafat postpositivisme, dimana metode ini digunakan untuk meneliti keadaan obyek yang alamiah. Hasil dari penelitian

kualitatif lebih menitik beratkan ke makna daripada generalisasi. Jadi pendekatan kualitatif lebih menitik beratkan ke perspektif konstruktif dan tidak bisa dihitung. Sedangkan menurut Sukmadinata (2008:94) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk bisa mengerti fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menurut Sugiyono (2018:13) penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka. Dengan metode penelitian tersebut maka diharapkan bisa mendapatkan data berupa uraian tertulis. Sedangkan menurut Darmadi (2011:7,145) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif yaitu berkaitan dengan pengumpulan data untuk bisa memberikan gambaran ataupun penegasan suatu konsep atau gejala, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek penelitian pada saat ini, contohnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, dan sebagainya. Metode penelitian deskriptif dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan makna daripada angka-angka yang memiliki tujuan memahami fenomena dari perspektif partisipan. Maka metode penelitian yang paling tepat untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di

Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Lebak. Karena peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif maka data yang didapatkan harus mendalam. Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang akan digunakan ialah:

a) Observasi

Menurut Sugiyono (Nasution 2018:226) menjelaskan bahwa observasi merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data, data ialah kebenaran tentang dunia nyata yang didapat melalui observasi. Masih menurut sugiyono (Marshall 2018:226) mengungkapkan bahwa dengan observasi peneliti bisa belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku itu sendiri. Jadi observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan dan melalui observasi peneliti bisa mengetahui bagaimana perilaku dari responden dan makna dibalik perilaku yang ditunjukkan oleh responden. Peneliti akan menggunakan observasi partisipasi pasif, menurut Sugiyono (2018:227) menyatakan bahwa observasi partisipasi pasif ialah peneliti hanya akan mengamati objek saja tanpa ikut berperan langsung.

Observasi penelitian ini dilakukan di PSRTS Provinsi Banten dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran PSRTS Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis dan juga faktor penghambat dan pendukung apa yang dihadapi oleh PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono (Esterberg 2018:231) menjelaskan bahwa wawancara

ialah pertemuan antara dua orang untuk saling memberi informasi atau ide melalui interaksi Tanya jawab hingga dapat dibangun ataupun diperoleh makna dari suatu topik tertentu. Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti akan melakukan studi pendahuluan agar bisa menemukan permasalahan yang harus diteliti, akan tetapi wawancara juga bisa digunakan apabila peneliti ingin mengetahui suatu hal dari responden secara mendalam. Wawancara ini berdasarkan pada data dari diri responden atau setidaknya pengetahuan dan keyakinan dari diri pribadi responden. Selain itu dalam melakukan wawancara selain dibutuhkan instrumen sebagai pedoman untuk melakukan wawancara, pengumpul data juga bisa menggunakan alat bantu seperti perekam suara, gambar, brosur dan hal lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan wawancara agar lancar.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu kegiatan pengumpulan data secara mendalam dimana 2 orang saling bertemu untuk bertukar informasi dan informasi tersebut bisa didapatkan melalui kegiatan tanya jawab lalu menghasilkan makna yang peneliti butuhkan untuk penelitiannya. Dan untuk memperlancar kegiatan wawancara peneliti bisa menggunakan alat bantu seperti alat perekam, gambar, brosur ataupun hal lainnya yang bisa mendukung dalam perolehan data.

Peneliti sendiri menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana menurut Sugiyono (Esterberg 2018:233) menjelaskan bahwa wawancara ini masuk kedalam *in-dept interview*. Maksudnya adalah dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Yaitu peneliti mengajukan

pertanyaan yang telah tersusun kepada informan kemudian satu persatu pertanyaan itu lebih diperdalam dengan pertanyaan yang tidak berstruktur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran PSRTS Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, kegiatan apa saja yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Adapun responden yang peneliti wawancara adalah Kepala PSRTS Provinsi Banten, seksi pemulihan dan pengembangan sosial PSRTS Provinsi Banten dan gelandangan dan pengemis yang dibina oleh PSRTS Provinsi Banten.

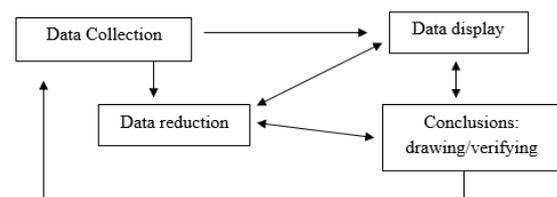
c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dan dokumen juga bisa berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya semisalkan, yang bisa berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi juga wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data, mereduksi data, penarikan kesimpulan, dan penyajian data. Menurut Sugiyono (Miles dan Huberman 2018:246-253) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya sudah jenuh atau tidak ditemukan hal baru lagi. Adapun aktivitas dalam analisis data berupa: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar.1 Komponen dalam analisis data



Sumber: Sugiyono (Miles dan Huberman 2018:247)

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Umum Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten

a. Kelembagaan

Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten membina masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar bisa menjalankan fungsi sosialnya menjadi normal kembali setelah dilakukan pembinaan di PSRTS Provinsi Banten.

b. Kedudukan

Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten merupakan sebuah panti milik Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten pasal 103 dan 106 menjelaskan bahwa Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung oleh Kepala Dinas Sosial.

c. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pemulihan dan pengembangan sosial.

d. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten memiliki 6 (enam) fungsi, adapun fungsi-fungsinya ialah:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial;
 - c) Pengelolaan di bidang pemulihan sosial;
 - d) Pengelolaan di bidang pengembangan sosial;
 - e) Pengelolaan sarana dan prasarana panti;
 - f) pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- e. Visi

"Terwujudnya Sumber Daya manusia yang terampil dan mandiri."

f. Misi

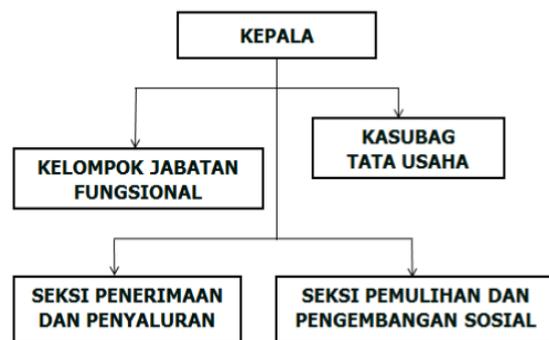
- a) Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial bagi Anak Remaja Putus Sekolah Telantar (RPST), Wanita Tuna Susila (WTS) / Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Gelandangan dan pengemis /

Masyarakat Miskin Rentan (MMR) dan eks Korban Napza;

- b) Meningkatkan kualitas pekerja sosial sebagai pelaksana/pemberi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) Memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial melalui kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan dan lembaga-lembaga sosial baik milik pemerintah maupun swasta.

g. Struktur Organisasi Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten

Gambar.2 Struktur Organisasi PSRTS Provinsi Banten



Sumber:PSRTS Provinsi Banten

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti akan menyajikan pembahasan penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan temuan penelitian yang peneliti lakukan. Pembahasan ini meliputi Peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, Kegiatan yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, dan faktor penghambat dan pendukung PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis.

1. Peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perumusan masalah tentang peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis maka didapat hasil yaitu:

a) Permakanan

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten ditanggung kebutuhan makannya oleh pihak panti selama berada di panti, selama siswa dibina di panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten selama 20 hari, kebutuhan makan ditanggung oleh pihak panti. Siswa diberi makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore dimana sudah ada petugas yang memasak makanan berat untuk siswa. Tidak hanya makanan berat siswapun diberi makanan ringan yaitu 1 kali sehari yang diberikan pada saat istirahat pelatihan montir motor di kelas. Siswa tidak mengalami masalah dengan menu makanan yang disajikan oleh pihak panti. Untuk menu yang disajikan sendiri setiap harinya berbeda-beda.

b) Sandang

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten diberi pakaian, adapun jenis pakaian yang diberikan oleh panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten ialah baju batik, celana hitam, baju

olahraga, baju praktek montir motor, baju koko, sarung, kaus putih, perlengkapan ibadah yaitu al-quran, sajadah, dan peci, dan perlengkapan mandi. Tidak hanya itu panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Bantenpun memberikan alat tulis berupa buku dan pulpen untuk siswa gunakan selama pembelajaran tentang materi montir motor di kelas.

c) Asrama

Selama 20 hari siswa dibina di panti, siswa difasilitasi asrama oleh panti adapun letak asrama yang diberikan oleh panti ialah di belakang kantor panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten. Setiap siswa yang dibina di dalam panti diberikan satu kamar, akan tetapi dikarenakan siswa tidak merasa nyaman untuk tidur sendirian akhirnya satu kamar diisi oleh dua siswa untuk siswa yang berasal dari kabupaten pandeglang, tetapi untuk siswa yang berasal dari kabupaten lebak sudah nyaman untuk 1 kamar 1 siswa, fasilitas yang ada di asrama sendiri yaitu ada kamar tidur yang telah diisi oleh tempat tidur susun, lemari, dan meja, selain itu ada ruang tengah yang berfungsi untuk tempat berkumpul siswa untuk melakukan bimbingan sosial, dan yang terakhir ada kamar mandi.

d) Perbekalan Kesehatan

Siswa diberikan perbekalan kesehatan berupa vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh siswa apalagi saat ini sedang mewabah virus covid-19 yang menyerang daya tahan tubuh. Untuk siswa yang mengalami sakit di periksa oleh petugas kesehatan yang berjaga di kantor panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten dan diberi obat sesuai keluhan yang dialami siswa.

e) Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Bimbingan Sosial

Bimbingan fisik berupa senam dan pelatihan fisik yang dipimpin oleh TNI, senam dilakukan setiap hari minggu yang dipandu oleh instruktur senam yang didatangkan oleh pihak panti, dan kegiatan pelatihan fisik dipimpin oleh TNI dilaksanakan setiap hari sabtu. Tidak hanya pelatihan fisik pada awal pembinaan siswa diberikan permainan berupa outbond agar siswa merasa senang berada di panti. Lalu ada bimbingan mental spiritual ada ceramah dan kultum yang dipimpin oleh ustad, dan bimbingan sosial berupa konseling dan motivasi yang diberikan oleh bpsdmd.

f) Bimbingan Keterampilan Dasar

Bimbingan keterampilan dasar yang diterima oleh siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten diberi

bimbingan keterampilan berupa montir motor, setiap angkatan berbeda-beda jenis keterampilan dan lama keterampilan yang diberikan. Untuk angkatan saat ini dikarenakan pandemi covid-19 bimbingan keterampilan yang diberikan hanya 20 hari, jenis bimbingan keterampilan sudah ditentukan oleh pihak panti jadi siswa tidak bisa memilih keterampilan apa yang diinginkan. Instruktur yang memberikan bimbingan berasal dari pekerja sosial.

g) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak

Hampir semua siswa yang dibina telah memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka tidak ada yang dibantu dibuahkan kartu identitas, Adapun satu siswa yang belum memiliki KTP dikarenakan siswa tersebut belum cukup umur untuk membuat KTP tetapi ia telah memiliki kartu identitas berupa akta kelahiran. Adapun bila benar-benar ada siswa yang tidak memiliki kartu identitas maka panti sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi Banten membantu membuat kartu identitas ialah dengan cara membantumenguruskan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil.

h) Akses Kelayanan Kesehatan Dasar

Seluruh siswa yang akan dibina di panti diberikan akses ke layanan kesehatan dasar karena PSRTS Provinsi Banten telah bekerja sama dengan dinas kesehatan, siswapun sebelum memulai pembinaan diberikan tes swab, untuk siswa yang tidak sehat akan diberikan pengobatan.

i) Pemulangan ke Daerah Asal

Siswa yang telah selesai dibina dipulangkan ke daerah masing-masing oleh dinas sosial, siswapun diberi modal usaha sesuai dengan keterampilan yang diterima. Untuk tahun ini karena pelatihan yang diterima adalah montir motor maka modal usaha yang diberikan berupa kunci-kunci dan kompresor, setelah siswa dipulangkan ada pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan dinas sosial agar siswa tidak kembali lagi menggelandang dan mengemis.

Hasil penelitian mengenai perumusan masalah tentang peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis diatas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Sub Indikator yang terkandung dalam standar rehabilitasi nasional tersebut meliputi:

- 1). Permakanan;
- 2). Sandang;

3). Asrama/cottage yang mudah diakses;

4). Perbekalan Kesehatan;

5). Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;

6). Bimbingan keterampilan dasar;

7). Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak;

8). Akses ke layanan kesehatan dasar; dan

9). Pemulangan ke daerah asal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten telah seluruhnya melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Yang pertama ada permakanan, dimana siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten ditanggung kebutuhan makannya oleh pihak panti selama berada di panti; kedua ada sandang, siswa diberi pakaian, perlengkapan ibadah, dan perlengkapan mandi; ketiga ada asrama, selama 20 hari siswa dibina di panti, siswa difasilitasi asrama oleh panti; keempat ada perbekalan Kesehatan, siswa diberikan perbekalan kesehatan berupa vitamin; kelima ada bimbingan fisik, mental spiritual, dan bimbingan sosial, bimbingan fisik berupa senam dan pelatihan fisik

yang dipimpin oleh TNI, bimbingan mental spiritual ada ceramah dan kultum yang dipimpin oleh ustad, dan bimbingan sosial berupa konseling dan motivasi yang diberikan oleh bpsdmd; ke-enam ada bimbingan keterampilan dasar, bimbingan keterampilan dasar yang diterima oleh siswa adalah pelatihan montir motor, dimana siswa diberikan materi dan praktek; ke-tujuh ada fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, karena semua siswa yang dibina telah memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka tidak ada yang dibantu dibuatkan kartu identitas, Adapun 1 siswa yang belum memiliki KTP dikarenakan belum cukup umur untuk membuat KTP tetapi ialah telah memiliki identitas berupa akta kelahiran; ke-delapan ada akses ke layanan kesehatan dasar, seluruh siswa yang akan dibina di panti diberikan akses ke layanan kesehatan dasar karena PSRTS Provinsi Banten telah bekerjasama dengan dinas kesehatan, siswapun sebelum memulai pembinaan diberikan tes swab, untuk siswa yang tidak sehat akan diberikan pengobatan; ke-sembilan ada pemulangan ke daerah asal, untuk siswa yang telah selesai dibina dipulangkan ke daerah masing-masing oleh dinas sosial, siswapun diberi modal usaha sesuai dengan keterampilan yang diterima. Untuk tahun ini karena pelatihan yang diterima adalah montir motor maka modal usaha yang diberikan

berupa kunci-kunci dan kompresor, setelah siswa dipulangkan ada pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan dinas sosial agar siswa tidak kembali lagi menggelandang dan mengemis.

2. Kegiatan yang dilakukan PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perumusan masalah kegiatan yang dilakukan PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis maka didapat hasil sebagai berikut:

a. Kegiatan bimbingan keterampilan dasar

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan keterampilan berupa pelatihan montir motor selama 20 hari di dalam panti, lama pembinaan tiap angkatan berbeda-beda karena covid 19 dan anggaran untuk pembinaan gelandangan dan pengemis di tarik untuk dialokasikan kepenanganan covid-19 maka lama pembinaan di pangkas menjadi 20 hari dan Angkatan yang dibina hanya satu angkatan yang berjumlah 10 orang, untuk pelatihan montir motor dilakukan dari hari senin-jumat pukul 8 pagi dan selesai pukul 3 sore. Pelatihan montir motor yang diterima oleh siswa adalah materi dan praktek. Siswa merasa pelatihan montir motor yang diberikan oleh PSRTS Provinsi Banten sangat bermanfaat karena pelatihan yang diberikan menambah skill siswa, siswa bisa

melamar kerja ke bengkel-bengkel karena setelah selesai pembinaan siswa diberikan sertifikat sebagai bukti telah menerima pelatihan montir motor atau siswa bisa membuka bengkel sederhana sendiri karena diberikan modal berupa kunci-kunci dan kompresor.

b. Kegiatan bimbingan mental spiritual

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan mental spiritual berupa ceramah dan kultum yang dipimpin oleh ustad, kegiatan ceramah dan kultum dilakukan setiap hari setelah solat maghrib. Kegiatan ceramah yang diberikan oleh ustad berupa metode tanya jawab agar siswa lebih aktif. Kultum dilakukan setelah ustad selesai memberikan ceramah, di metode Tanya jawab itulah siswa melakukan kultum. Dimana siswa yang mampu menjawab pertanyaan ustadlah yang melakukan kultum. Bimbingan mental spiritual yang diberikan oleh pihak panti sangat bermanfaat untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin beribadah.

c. Kegiatan bimbingan fisik

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan fisik berupa senam dan pelatihan fisik, senam dilakukan setiap hari minggu yang dipandu oleh instruktur senam yang didatangkan oleh pihak panti, dan kegiatan pelatihan fisik dipimpin oleh TNI, bentuk pelatihan fisik yang

diberikan berupa lari, *sit-up* dan *push-up*. Siswa merasa bimbingan fisik yang diberikan bermanfaat karena membuat mereka tidak berolahraga. Tidak hanya pelatihan fisik pada awal pembinaan siswa diberikan permainan berupa outbond agar siswa merasa senang berada di panti.

d. Kegiatan bimbingan sosial

Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Banten diberikan bimbingan sosial berupa motivasi, bimbingan sosial diberikan oleh BPSDMD. Pemberian motivasi dilakukan agar siswa yang memiliki masalah dapat terpecahkan masalahnya dan siswa betah berada di panti. Siswa merasa bimbingan sosial yang diterima bermanfaat.

Hasil penelitian mengenai perumusan masalah tentang kegiatan yang dilakukan PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis diatas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang mewajibkan 4 program kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu adalah kegiatan bimbingan keterampilan dasar, kegiatan bimbingan mental spiritual, kegiatan bimbingan fisik, dan kegiatan bimbingan sosial.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten telah seluruhnya melaksanakan 4

program kegiatan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi dimana PSRTS Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan bimbingan keterampilan dasar berupa pelatihan montir motor, lalu ada kegiatan bimbingan mental spiritual yaitu ada siraman rohani dari pemuka agama, dan melaksanakan kuliah tujuh menit(kultum), ada kegiatan bimbingan fisik berupa senam dan pelatihan fisik, dan yang terakhir ada kegiatan bimbingan sosial yaitu pemberian konseling dan motivasi dari BPSDMD.

3. Faktor penghambat dan pendukung PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perumusan masalah faktor penghambat dan pendukung PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis maka didapatkan hasil berupa:

a. Hambatan internal

PSRTS Provinsi Banten tidak mengalami hambatan secara internal baik itu untuk menentukan program yang akan dilaksanakan dalam membina siswa, ataupun hambatan kuantitas sumber daya manusia ketika membina siswa karena panti sudah bekerja sama dengan dinas-dinas yang dibutuhkan untuk pelatihan siswa dan juga sudah

bekerjasama dengan pekerja sosial. Siswa yang dibina di PSRTS Provinsi Bantenpun tidak mengalami kendala berarti, siswa mampu mengikuti kegiatan dengan baik.

b. Hambatan external

Hambatan external yang dialami ialah keterlambatan dinas sosial kabupaten/kota dalam mengirim siswa ke panti dikarenakan pandemi covid-19 dan siswa pada awalnya merasa tidak betah berada di panti namun seiring berjalannya waktu akhirnya siswa merasa nyaman berada di panti. Dan siswa merasa kepanasan dikarenakan tidak ada ac/kipas angin di asrama sedangkan desain asrama adalah desain untuk penggunaan ac, dan hambatan external yang dialami siswa adalah kekurangan air untuk mandi dikarenakan satu asrama hanya ada satu kamar mandi.

c. Faktor pendukung

PSRTS Provinsi Banten bekerjasama dengan dinas-dinas untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Adapun dinas-dinas yang bekerjasama dengan PSRTS Provinsi Banten ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dan bpsdmd. Selain dinas PSRTS Provinsi Banten juga bekerja sama dengan TNI.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu adanya hambatan external dimana adanya keterlambatan pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke PSRTS Provinsi Banten dikarenakan

adanya pandemic covid-19 yang seharusnya kegiatan dimulai pada bulan Juli mundur hingga bulan November. Adapun faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya kerjasama dengan dinas-dinas untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Adapun dinas-dinas yang bekerjasama dengan PSRTS Provinsi Banten ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPSDMD, selain bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BPSDMD PSRTS Provinsi Banten juga bekerja sama dengan TNI.

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis melalui merealisasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana dalam peraturan tersebut ada permukiman, sandang, asrama/*cottage* yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan pemulangan ke daerah asal. Semua standar rehabilitasi nasional telah dilaksanakan oleh Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dengan baik, kecuali mengenai fasilitas pembuatan nomor indu kependudukan, akta kelahiran,

surat nikah, dan/atau kartu identitas anak dikarenakan hamper semua siswa yang dibina oleh PSRTS Provinsi Banten telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), adapun satu siswa yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dikarenakan ia belum cukup umur untuk memiliki KTP akan tetapi ia telah memiliki akta kelahiran sebagai identitas diri.

2. Kegiatan yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu kegiatan keterampilan berupa pelatihan montir motor, kegiatan bimbingan mental spiritual berupa ceramah dan kultum, kegiatan bimbingan fisik berupa senam dan latihan fisik, dan kegiatan bimbingan sosial berupa pemberian motivasi. Semuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten.

Faktor penghambat dan pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu adanya hambatan external dimana adanya keterlambatan pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke PSRTS Provinsi Banten dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang seharusnya kegiatan dimulai pada bulan Juli mundur hingga bulan November dan siswa pada awalnya merasa tidak nyaman berada di panti namun seiring berjalannya waktu akhirnya siswa merasa nyaman berada di panti. Dan siswa merasa kepanasan dikarenakan tidak ada ac/kipas angin di asrama sedangkan desain asrama adalah desain untuk penggunaan ac, dan hambatan lainnya yang dialami siswa adalah kekurangan air untuk mandi

dikarenakan satu asrama hanya ada satu kamar mandi. Adapun faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya Kerjasama dengan dinas-dinas untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Adapun dinas-dinas yang bekerjasama dengan PSRTS Provinsi Banten ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPSDMD, selain bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BPSDMD PSRTS Provinsi Banten juga bekerja sama dengan TNI.

Daftar Pustaka

- Admin dinsos. (2019) Mensos Hadiri Workshop Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Tersedia dari <https://dinsos.bantenprov.go.id/read/berita/964/Mensos-Hadiri-Workshop-Nasional-Gelandangan-dan-Pengemis.html>. diakses pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 10:36 WIB
- Aplikasi AllStats BPS. (diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 12:29 WIB)
- Arfiani, D. (2009) Berantas Kemiskinan. Semarang: Alprin
- Bahtiar, R. (2019) Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia Ini Sebabnya. Tersedia dari <https://m.detik/finance/berita-ekonomibisnis/d4772807/pengangguran-di-banten-tertinggi-se-indonesia-ini-sebabnya>. diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14:35 WIB
- Darmadi, H. (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Dinas Sosial Provinsi Banten. (2018) *Pemutakhiran Data Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. Banten: Dinas Sosial Provinsi Banten
- Fatma, SF. (2005) Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. (TESIS, Universitas Indonesia).
- Firadika, RA. (2017) Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945: Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa. (SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Pasal 103-106
- Rina, A. (2019) Angka Pengangguran di Indonesia Capai 7,05 Juta di Agustus 2019. Tersedia dari <https://www.google.co.id/amp/s/akbis.sindonews.com/newsread/1455746/34/angka-pengangguran-di-indonesia-capai-705-juta-di-agustus-2019-1572293479>. diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14:10 WIB
- Ririn, NF. (2018) Penanganan Gelandangan Tak Cukup Dengan Penertiban. Tersedia dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01301538/penanganan-gelandangan-tak-cukup-dengan-penertiban-430643>. diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 21:53 WIB)
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, SN. (2008) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tempo.co. (2015) Demi Keindahan Kota Pengemis Diusir dari Bekasi. Tersedia dari <https://www.google.co.id/amp/metro.tempo.co/amp/677111/demi-keindahan-kota-pengemis-diusir-dari-bekasi>. diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 11.19 WIB
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)
- Wardiansyah, dkk. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi se-Sumatera)*. Vol. 5. No. 1. Jambi: Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan